

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis Peranan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilakukannya penelitian dengan fokus pada teori dan hasil dari temuan data yang di dapat. Adapun indikator yang digunakan ditinjau dari teori marschall yang terdiri dari (3) indikator, yaitu (1) adanya forum untuk menampung partisipasi, (2) kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Dilakukannya juga kajian secara mendalam dari ketiga indikator tersebut dengan data yang didukung dari hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berbeda dengan lembaga kelurahan lainnya. Pasalnya Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan lembaga kelurahan yang sifatnya pengawas dan langsung bermitra kepada lurah. Pelaksanaan tugas Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) itu sendiri sebagai lembaga kelurahan yang mewadahi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan juga dijadikan sebagai pihak yang diikutsertakan oleh lembaga kelurahan lainnya dalam rangka membantu kelancaran tersebut untuk mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan dua atau pada tahap penentraman yakni komunikasi sudah berjalan baik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat juga memiliki akses dalam menyampaikan pendapat mereka, tetapi kewenangan penilaian tetap berada pada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga indikator yang dikemukakan oleh Marschall ditemukan beberapa aspek yang memang seharusnya bisa dioptimalkan. Hal tersebut ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaan peran LMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat :

1. Forum Partisipasi

Dalam hal adanya forum untuk menampung partisipasi ini LMK berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi hal tersebut belum berjalan secara optimal. Masih adanya partisipasi masyarakat di sebagian wilayah yang memang kurang partisipasinya disebabkan oleh kesibukan, usia, dan prioritas yang berbeda-beda. Disisi lain juga kegiatan yang dilakukan terkesan monoton, pasalnya kegiatan yang berlangsung merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya ada dan terkesan kurang menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi..

2. Keterlibatan Masyarakat

Dalam hal kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ini ditermukannya permasalahan terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat. Masyarakat. Mereka memahami LMK berperan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi mereka tidak paham peran dan hak serta kewajiban mereka sebagai masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan partisipasi didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan yang bisa dibilang rendah, karena orang yang bisa dibilang pendidikannya lebih tinggi memiliki prioritas berbeda atau lebih berfokus pada kesibukannya dan hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman masyarakat.

3. Akses Masyarakat

Dalam hal akses masyarakat untuk berpartisipasi khususnya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan ini ditermukannya permasalahan terkait belum memaksimalkan memanfaatkan

media sosial untuk memberikan informasi dan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan penyampaian informasi lebih berfokus pada surat resmi yang dikeluarkan oleh kelurahan, sekalipun itu menggunakan media sosial melalui grup whatsapp, hal tersebut dikatakan kurang efektif karena tidak semua masyarakat masuk dalam grup tersebut.

Berdasarkan analisis tangga partisipasi menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat di Kelurahan berada pada tingkatan kedua atau tokenism dan belum bisa ke tingkat ketiga atau kekuatan masyarakat. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- **Informasi** : Meskipun LMK telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, penyebaran informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif. Beberapa informasi tidak dapat memastikan informasi tersebut sampai ke seluruh lapisan masyarakat atau tidak.
- **Konsultasi** : Meskipun terdapat forum konsultasi, keputusan akhir tetap berada di tangan Kelurahan. Hal ini dapat mengurangi rasa memiliki dan partisipasi aktif dari masyarakat.
- **Penentraman** : Tingkat partisipasi masyarakat cenderung berada pada tahap "tokenisme" menurut teori Arnstein. Artinya, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, namun tidak memiliki kendali penuh atas keputusan akhir.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan sudah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini terkait peran LMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengoptimalan peran LMK dalam menjalankan perannya. Rekomendasi dari hasil penelitian Analisis Peran

LMK Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro sebagai berikut :

1. Forum Partisipasi

Dalam hal forum untuk menampung partisipasi masyarakat perlunya lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang menarik dan juga relevan dengan kebutuhannya masyarakat dengan memperhatikan beberapa bentuk kegiatan seperti edukatif, interaktif, dan juga menyenangkan. Pemanfaatan media informasi juga perlu dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara online terutama dalam menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam berpartisipasi sehingga LMK dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi dalam hal sosialisasi program dan menjaring aspirasi masyarakat.

2. Keterlibatan Masyarakat

Dalam hal kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perlunya diadakan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan atau *workshop* terutama dalam memahami bagaimana proses pengambilan keputusan, cara menyampaikan aspirasi, dan juga seputar hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Akses Masyarakat

Dalam hal akses masyarakat untuk berpartisipasi khususnya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan perlunya penguatan dari segi komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran dan tidak tergantung pada salah satu saluran saja, misalnya melalui Instagram ataupun website. Dalam menjangkau sumber daya yang lebih luas lagi perlunya kolaborasi atau menjalin kerja sama dalam memperluas jangkauan dan sumber daya sehingga berjalan dengan optimal.

Secara keseluruhan, LMK Bintaro telah menunjukkan upaya yang baik dalam melibatkan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui :



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadjijono, (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG.
- Edi Riadi. (2011). *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*, Jogjakarta: Andi Offset
- Moloeng, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solichin, A. W. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Akasara,.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen, Magelang* : StaiaPress
- Hardani dkk, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup.
- Sukendra, I Komang dan I Kadek Surya Atmaja. (2020). *Instrumen Penelitian*. Mahameru Press.
- Purnia, Dini Silvia, dan Tuti Alawiyah. (2020). *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (4th ed.). Bandung: Alfabeta
- Hafni, Syafrida Sahir (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Pub. L. No. 25 (2014).  
<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/60/undang-undang-nomor-25-tahun-2004>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pub. L. No. 8 (2008).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4820>

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pub. L. No. 5 (2010). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/12554>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pub. L. No. 6 (2014).  
[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU\\_062014.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU_062014.pdf)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pub. L. No. 47 (2015).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 47 (2015).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Pub. L. No. 18 (2018).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pub. L. No. 4 (2024). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14007>

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, Pub. L. No. 2 (2024).  
[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177198/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2024.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177198/Salinan_UU_Nomor_2_Tahun_2024.pdf)

### **C. Dokumen**

Pemerintah Kelurahan Bintaro, (2024). Laporan Bulan Agustus Kelurahan Bintaro Tahun 2024

LMK Kelurahan Bintaro. (2024). Laporan Tahunan LMK Kelurahan Bintaro Tahun 2024.

### **D. Jurnal**

Mita, R. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 11, Issue 2, pp. 71–79).

Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.  
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

Hasan, & Suryanti. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3), 55–65.  
<https://media.neliti.com/media/publications/284688-sistem-perencanaan-pembangunan-dalam-pen-eb279cb3.pdf>

Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.

Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.

Andi, U., Akhwan, A., Ahmad, M., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.

- Simanullang, T. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Rt 03 Jalan Poros Kebon Agung Kelurahan Lempake. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4), 219–230.
- Ranjamandu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 359–366. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2016>
- L, T., & Surat. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 31–41.
- Nurmiyati, N., Zuhriyati, E., & Noor, M. (2020). Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Moderat*, 6(2), 376–396.
- Asus, S. T. K., Esa, P. A. D. A. D., Etan, C. I. W., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 1–7.
- Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(April), 590–604. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>

Indriyani. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 112.

Ni Wayan Desi Budha Jayanti. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51–58.  
<https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>



POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA